

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA
(FRENCHISEE) TERHADAP PEWARALABA (FRANCHISOR)
YANG TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA PENDAFTARAN
WARALABA (STPW)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

TIKA AYU LISTIA NINGRUM

C100170011

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA
(FRANCHISEE) TERHADAP PEWARALABA (FRANCHISOR) YANG
TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(STPW)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

TIKA AYU LISTIA NINGRUM

C100170011

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Inayah', written in a cursive style.

(Inayah, S.H., M.H)

NIK/NIDN.

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA
(FRANCHISEE) TERHADAP PEWARALABA (FRANCHISOR) YANG
TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA
(STPW)

OLEH
TIKA AYU LISTIA NINGRUM
C100170011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Jumat, 27 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Andria Luhur, S.H., M.Kn
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan,

Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh

Surakarta, 27 Agustus 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TIKA AYU LISTIA NINGRUM' with a stylized flourish at the end.

TIKA AYU LISTIA NINGRUM

C100170011

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRENCHISEE) TERHADAP PEWARALABA (FRANCHISOR) YANG TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

Abstrak

Bisnis waralaba yang mengalami terjadi sangat pesat dan menjadi salah satu pemberi dampak pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Franchise menjadi sebuah pilihan yang menjanjikan karena mekanisme yang relatif efisien dan efektif serta resiko kerugian yang cukup kecil. Setiap waralaba diharuskan untuk mempunyai surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Namun, masih terdapat waralaba yang tidak mempunyai STPW tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari waralaba yang tidak mempunyai STPW serta akibat hukum bagi penerima ataupun pemberi waralaba yang tidak memiliki STPW. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian waralaba apabila tidak ada STPW adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebab perjanjian waralaba tanpa STPW dianggap melanggar syarat dari perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal. Adapun perlindungan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa penulisan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara jelas di perjanjian sedangkan untuk perlindungan hukum secara represif yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang sudah ditunjuk sebelumnya dalam perjanjian. Selain itu perlindungan hukum penerima waralaba juga dapat berupa pencantuman klausula minimum perjanjian waralaba, pemberian sanksi administratif terhadap pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan waralaba serta adanya klausul mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan, hak ahli waris juga klausula jaminan.

Kata Kunci: waralaba, perlindungan hukum, surat tanda daftar waralaba (stpww)

Abstract

The franchise business is experiencing a very rapid occurrence and has become one of the impactors of economic growth, especially in Indonesia. Franchise becomes a promising choice because of the relatively efficient and effective mechanism and the risk of loss is quite small. Each franchisee is required to have a franchise registration certificate (STPW). However, there are still franchises that do not have the STPW. This study aims to determine the legal consequences of franchises that do not have STPW and the legal consequences for recipients or franchisors who do not have STPW. The type of research used in this research is normative research. The results of the study indicate that the legal consequence of a franchise agreement if there is no STPW is that the agreement is null and void. Because a franchise agreement without STPW is considered a violation of the terms of the agreement related to a lawful cause. As for the legal protection of the franchisee in the franchise agreement which is not preceded by the registration of the Franchise Registration Certificate (STPW), namely preventive and repressive

legal protection. Preventive legal protection is in the form of writing the rights and obligations of each party clearly in the agreement, while for repressive legal protection, namely by resolving disputes through institutions that have been previously designated in the agreement. In addition, the legal protection of the franchisee can also be in the form of the inclusion of a minimum clause in the franchise agreement, the provision of administrative sanctions against the franchisor who does not register a franchise and the existence of clauses regarding ownership, change of ownership, heir rights as well as a guarantee clause.

Keywords: franchise, legal protection, franchise registration certificate (stpww)

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya globalisasi dewasa ini memberikan konsekuensi terkait kecenderungan tanpa batas (*bonderless state*) (Sembiring, 2010). Termasuk konsekuensi berupa dampak yang sangat besar bagi segala aspek kehidupan terutama hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di masyarakat mengalami pergerakan yang cukup besar seperti halnya dapat dilihat bahwa masyarakat mulai bergerak dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern. Seperti contohnya perkembangan dalam bisnis franchise yang mengalami terjadi sangat pesat dan menjadi salah satu pemberi dampak pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia.

Franchise menjadi sebuah pilihan yang menjanjikan karena mekanisme yang relatif efisien dan efektif serta resiko kerugian yang cukup kecil. Di Indonesia sendiri, Franchise atau waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sebagaimana waralaba yang termaktub dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian waralaba.

Waralaba di dalamnya termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus terdaftar yaitu antara lain merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang seperti yang termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Franchise dalam perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor karena franchise merupakan sebuah kombinasi

yang bersumber dari pengetahuan dan juga kekuatan satu usaha yang telah ada dan mapan (Margono, 2010).

Dalam pelaksanaannya franchise secara umum harus didasarkan pada suatu perjanjian waralaba. Perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya lebih khusus mengenai waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Pada dasarnya waralaba merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba yang di dalamnya terdapat pula sejumlah kewajiban atau pembayaran guna melakukan penjualan produk baik berupa barang dan/atau jasa sesuai dengan perjanjian waralaba yang disepakati (franchise agreement) (Purwanti dan Wisanjaya, 2014). Mengenai waralaba ini seorang pelaku usaha memiliki kebebasan untuk menjalankan sendiri usaha tertentu di sebuah wilayah-wilayah tertentu (Simatupang, 2003).

Perjanjian waralaba umumnya meliputi berbagai bidang baik pendidikan, restoran, hiburan, dan lain-lain. Perjanjian waralaba sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, harus dijalankan sesuai dengan asas-asas kebebasan berkontrak seperti yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketertiban umum serta kesusilaan (Subekti, 2002). Selain itu para pihak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kemungkinan wanprestasi dalam usahanya.

Pihak franchisee yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra dari franchisor memerlukan sebuah kepastian dan perlindungan hukum mengenai kegiatan usaha yang akan dijalankan seperti apakah suatu produk yang akan dijual benar-benar teruji atau apakah produk tersebut disukai oleh pasar (Widjaja, 2001). Urgensi sebuah kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan franchise berkaitan dengan kemungkinan apabila terjadi wanprestasi dalam kemudian hari. Kemudian persoalan muncul ketika terjadi wanprestasi diantara para pihak terlebih kemudian diketahui bahwa perjanjian waralaba tersebut tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Pada prinsipnya, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba dapat dinyatakan tidak berlaku apabila Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Selanjutnya, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Penerima Waralaba dapat dinyatakan tidak berlaku apabila Perjanjian Waralaba berakhir, Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya, dan atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) berguna sebagai bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan sekaligus pula sebagai bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : *pertama*, bagaimana akibat hukum suatu perjanjian waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ketika terjadi wanprestasi? *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (frenchisee) dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)?

2. METODE

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian doktrinal atau normatif. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan hasil analisis mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*frenchisee*) terhadap pewaralaba (*franchisor*) yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Dalam penelitian ini

penulis menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undang (statute approach) dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai waralaba. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagaimana pendekatan ini adalah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai waralaba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Perjanjian Waralaba yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Ketika Terjadi Wanprestasi

Perjanjian bisa disebut juga sebagai persetujuan dimana dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. M. Yahya Harahap, SH mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi (Harahap, 1986).

Waralaba sendiri saat ini diatur dalam 3 peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba .

Definisi waralaba menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba dijelaskan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Waralaba merupakan sebuah usaha atau bisnis dengan cara seorang pemberi waralaba memberikan hak khusus yang dia miliki akan sebuah produk kepada

seorang penerima waralaba. Penerima waralaba wajib membayar untuk mendapatkan hak memanfaatkan produk tersebut untuk sebuah keuntungan.

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Setiap pendirian dari sebuah waralaba, maka harus didahului dengan perjanjian. Adapun perjanjian waralaba dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba lanjutan.

Perjanjian waralaba dapat dikatakan sebuah pegangan dari para pihak baik penerima ataupun pemberi waralaba untuk menjalankan waralaba tersebut. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian tersebut dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian. Adapun syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: *Sepakat untuk mengikatkan diri*. Arti sepakat disini adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik pemberi waralaba dan penerima waralaba ataupun pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. Keduanya harus bersepakat secara sadar untuk melakukan sebuah perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut pasal 1330 KUHP, setiap orang adalah cakap membuat perjanjian kecuali yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Seseorang yang tidak cakap adalah belum dewasa, tidak sehat akal serta berada di bawah pengampuan. Apabila seseorang yang tidak cakap melakukan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Dalam perjanjian waralaba kecakapan ini dibuktikan dengan adanya tanda pengenal atau identitas yaitu KTP bagi para pihak yang melakukan perjanjian waralaba.

Suatu Hal tertentu. Sebuah perjanjian harus mengenai suatu objek tertentu, tak terkecuali perjanjian waralaba. Suatu hal tertentu dapat berupa pokok

perjanjian, objek serta prestasi yang harus dipenuhi. Berdasarkan pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Kemudian Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan barang yang dapat diperjanjikan harus ditentukan secara jelas, seperti dalam perjanjian waralaba adalah waralabanya itu sendiri.

Sebab (Causa) yang Halal. Suatu sebab yang halal adalah isi serta tujuan dari perjanjian waralaba merupakan sesuatu yang sah serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, ketentuan perjanjian waralaba minimum memiliki klausula-klausula yang disepakati meliputi, antara lain : nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian waralaba timbul dengan mengedepankan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang mana dapat diartikan bahwa setiap orang bisa secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Kebebasan tersebut tetap pada batasannya, yaitu sepanjang kebebasan tersebut tetap berada dalam batas-batas persyaratannya dan tidak melanggar hukum.

Namun, sebelum melakukan perjanjian waralaba pemberi waralaba harus memberikan Prospektus Penawaran Waralaba yaitu keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi Waralaba.

Setelah adanya perjanjian waralaba hal yang dilakukan selanjutnya oleh pelaku waralaba adalah pendaftaran waralaba tersebut untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Pengertian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi

Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Kewajiban kepemilikan STPW diatur dalam Pasal 11 Permendag No 12 Tahun 2006, Pasal 10-Pasal 11 PP No 42 Tahun 2007 serta Pasal 10 Permendag yang ketiganya menyatakan bahwa para pihak dalam penyelenggaraan waralaba wajib memiliki STPW. Lembaga yang berwenang dalam pendaftaran prospektus ataupun perjanjian waralaba diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Permendag No 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pemberi waralaba luar negeri wajib pendaftaran STPW melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Sedangkan penerima waralaba dari pemberi waralaba dalam negeri pendaftaran melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan daerah setempat. Sedangkan pengajuan permohonan STPW dalam PP No 42 Tahun 2007 diajukan ke Menteri melalui dinas perdagangan setempat.

Persyaratan pendaftaran tersebut dalam Permendag No 12 Tahun 2006 juga melampirkan tanda daftar perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Dalam Permendag No 12 Tahun 2006, permohonan diajukan maksimal 30 hari setelah berlakunya perjanjian. Proses paling lambat 5 hari setelah diterima permohonan dan perbaikan permohonan diberi waktu 5 hari kerja. Kemudian diubah dalam PP No 42 Tahun 2007 yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2008 yaitu paling lambat 3 hari dan perbaikan 3 hari. Hingga kemudian dalam Permendag No 71 Tahun 2019, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, permohonan paling lambat diproses 5 hari setelah diterima dan perbaikan dilakukan paling lambat 2 hari. Pendaftaran waralaba tidak dikenakan biaya apapun.

Dalam Permendag No 12 Tahun 2006 dan PP No 42 Tahun 2007, masa berlaku STPUW selama 5 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permendag No 12 Tahun 2006 dan Pasal 12 ayat (5) PP No 42 Tahun 2007. Lebih lanjut dalam Permendag No 12 Tahun 2006 STPW dapat diperpanjang apabila jangka waktu Perjanjian Waralaba masih berlaku. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (6) PP No 42 Tahun 2007 STPW dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kedua aturan tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Permendag No 71 Tahun 2019, dimana dalam STPW masih berlaku selama waralaba masih berjalan. Namun dapat berakhir apabila penghentian kegiatan usahanya, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir serta perjanjian Waralaba berakhir;

Bagi pelaku waralaba yang tidak mempunyai STPW dalam Pasal 23 Permendag No 12 Tahun 2006 diberi sanksi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut apabila tetap melanggar maka dikenakan sanksi pencabutan SIUP atau izin lain yang sejenis. Kemudian dalam Pasal 16 PP No 42 Tahun 2007, sanksi bagi waralaba yang tidak memiliki STPW adalah peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Denda diberikan setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika penerima tidak tau ada tidaknya STPW maka pemberi waralaba akan diberi sanksi sebagaimana tercantum dalam PP No 42 Tahun 2007 yang mana dikarenakan 2 hal tidak mempunyai STPW dan tidak memberikan pembinaan kepada penerima waralaba yaitu : peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Denda diberikan setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pencabutan STPW apabila tidak memberikan pembinaan dan sudah diperingatkan sebanyak 3 kali.

Jika belum mendaftar maka kedua belah pihak baik penerima maupun pemberi waralaba yang harus mendaftarkan karena keduanya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan. Akibat hukum dari perjanjian waralaba apabila tidak ada STPW adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebab perjanjian waralaba tanpa STPW dianggap melanggar syarat dari perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal, dengan tidak adanya STPW maka waralaba tersebut sudah menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum.

Batal demi hukum disini berarti perjanjian waralaba dianggap tidak pernah ada dan pemberi waralaba wajib untuk menggantikan atau mengembalikan nominal pembiayaan yang telah diserahkan oleh penerima waralaba. Penerima waralaba tidak perlu membatalkan perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada beserta dengan hal-hal yang telah diperjanjikan di dalamnya.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Perjanjian Waralaba yang Tidak Didahului dengan Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam rangka kepentingannya (Rahardjo, 2003). Perjanjian waralaba dapat dikatakan sebagai salah satu perlindungan hukum terhadap para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Perjanjian waralaba dapat menjadi dasar hukum untuk menegakkan perlindungan hukum. Apabila salah satu pihak melanggar isi dari perjanjian tersebut maka dapat menuntut atau meminta pertanggungjawaban dari pihak lain sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Pembuatan STPW bagi *franchisee* ini adalah sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *franchisee*. Kewajiban untuk mempunyai STPW bagi setiap *franchisor* adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi *franchisor* ataupun *franchisee* itu sendiri. Ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang disepakati maka STPW bisa menjadi salah satu pegangan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu jika apabila sebuah perjanjian waralaba telah didahului dengan STPW maka waralaba tersebut telah diakui secara sah di mata hukum dan

juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan untuk melakukan permohonan STPW.

Proses pengajuan STPW yang terbilang cukup rumit dan mendetail bertujuan agar waralaba yang didaftarkan dan kemudian mendapatkan STPW benar-benar telah sesuai dengan syarat-syarat sebuah usaha waralaba. Maka ketika perjanjian waralaba tidak didahului dengan STPW maka akan disangsikan kesesuaiannya dengan yang dipersyaratkan Undang-Undang.

Syarat tersebut dituangkan dalam sebuah prospektus penawaran waralaba, yang mana prospektus tersebut kemudian dimohonkan untuk dimintakan STPW. Ketika sebuah waralaba telah mempunyai STPW maka dapat dipastikan bahwa waralaba tersebut sah di mata hukum, sebaliknya ketika sebuah perjanjian waralaba tidak didahului oleh pendaftaran STPW maka dikhawatirkan waralaba tersebut illegal dan dapat merugikan penerima waralaba.

Adapun perlindungan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah sebagai berikut: *Perlindungan hukum preventif dan Represif*. Perlindungan Hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan kedua belah pihak pelaku bisnis waralaba serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melaksanakan kewajiban dalam waralaba (Aidi dan Farida, 2019). Sedangkan perlindungan hukum represif menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari (Aidi dan Farida, 2019).

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan penulisan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik pemberi ataupun penerima waralaba secara jelas. Hal ini untuk menciptakan kesepahaman dalam menjalankan usaha waralaba. Sehingga meminimalkan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang sifatnya penyelesaian sengketa. Dalam sebuah perjanjian ada 2 cara penyelesaian sengketa yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa ini perlu dicantumkan dalam perjanjian waralaba agar ketika terjadi sebuah wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mendapatkan haknya. Dalam perjanjian waralaba

yang tidak didahului oleh STPW maka penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga non-litigasi dalam hal ini dapat berupa lembaga arbitase.

Pencantuman Klausula minimum Perjanjian waralaba. Dalam sebuah perjanjian waralaba harus dicantumkan klausula minimum sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu : identitas para pihak, jenis HKI, kegiatan usaha, hak masing-masing pihak, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, penyelesain sengketa, tata cara perpanjangan dan pemutusan perjanjian.

Adanya klausula tambahan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengharuskan adanya klausul mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris. Selaian itu dalam sebuah perjanjian waralaba juga diharuskan mencantumkan klausula jaminan bahwa pemberi waralaba wajib menjalankan kewajibannya hingga waktu perjanjian selesai dan juga mencantumkan jumlah gerai yang dikelola oleh pemberi waralaba.

Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pemberi Waralaba yang tidak mendaftarkan waralaba. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pemebri waralaba yang tidak mendaftarkan waralaba dapat berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi berupa denda.

Sanksi peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 2 minggu terhitung dari diberikannya surat peringatan yang pertama. Apabila sampai peringatan ketiga tidak didaftarkan maka akan diberikan sanksi denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah sebagai berikut : Akibat hukum dari perjanjian waralaba apabila tidak ada STPW adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebab perjanjian waralaba tanpa STPW dianggap melanggar syarat dari perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Tidak adanya STPW maka waralaba tersebut sudah menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum disini berarti perjanjian waralaba dianggap tidak pernah ada dan pemberi waralaba wajib untuk menggantikan atau mengembalikan nominal pembiayaan yang telah diserahkan oleh penerima waralaba. Penerima waralaba tidak perlu membatalkan perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada beserta dengan hal-hal yang telah diperjanjikan di dalamnya.

Adapun perlindungan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa penulisan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara jelas di perjanjian sedangkan untuk perlindungan hukum secara represif yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang sudah ditunjuk sebelumnya dalam perjanjian. Selain itu perlindungan hukum penerima waralaba juga dapat berupa pencantuman klausula minimum perjanjian waralaba, pemberian sanksi administratif terhadap pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan waralaba serta adanya klausul mengenai kepemilikan, perubahan kepemilikan, hak ahli waris juga klausula jaminan.

4.2 Saran

Untuk pemberi waralaba agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai waralaba utamanya dalam hal ini mengenai pendaftaran waralaba, sebab hal itu merupakan kewajiban dari pemberi waralaba.

Untuk penerima waralaba, ketika akan membuat suatu perjanjian waralaba dengan pemberi waralaba maka harus memastikan bahwa waralaba tersebut mempunyai dokumen yang lengkap salah satunya STPW, sebab jika dikemudian hari waralaba tersebut diketahui tidak mempunyai STPW maka perjanjian akan batal dan membuat penerima waralaba tidak dapat membuka waralaba tersebut serta apabila pemberi waralaba tidak mempunyai STPW maka dikhawatirkan akan membuat penerima waralaba tidak mengetahui terkait dengan STPW yang juga harus dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Zil dan Hasna Farida. (2019). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan. *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4. No 2. Maret 2019*.
- Margono, Suyud. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Purwanti, Ni Luh Putu Wulan dan Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli*. Volume 2 Nomor 6.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sembiring, Sentosa. (2010). *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simatupang, Richard Burton. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. JakartaPT. Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap, M. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.